

Kode>Nama Rumpun Ilmu*: 424/Perencanaan Wilayah dan Kota
Bidang Fokus** : Teknologi dan Manajemen Lingkungan

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL**



**JUDUL PENELITIAN
ANALISA KEBUTUHAN DATA KEBUTUHAN POKOK DAN
PENENTUAN HARGA SUBSIDI DALAM RANGKA OPERASI PASAR
MURAH (OPM) BERDASARKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN BOGOR**

TIM PENGUSUL

Ketua Tim : Aditianata, ST. M.Si.

NIDN. 0321118403

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN INTERNAL**

Judul Penelitian : Analisa Kebutuhan Data Kebutuhan Pokok Dan Penentuan Harga Subsidi Dalam Rangka Operasi Pasar Murah (OPM) Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Di Kabupaten Bogor

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 424/Perencanaan Wilayah dan Kota

Peneliti

a. Nama Lengkap : Aditianata, ST., M.Si.
b. NIDN : 0321118403
c. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
d. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
e. Nomor HP : 081284249937
f. Alamat surel (*e-mail*) : aditianata@esaunggul.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : -
b. NIDN : -
c. Perguruan Tinggi : -

Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,-

Biaya Luaran Tambahan : -

Jakarta, 19 Agustus 2020

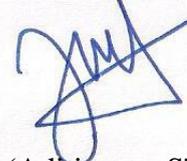
Mengetahui,
Dekan



Universitas
Esa Unggul
Fakultas Teknik

(Ir. Roesfiansjah Rasjidin, MT., Ph.D)
NIK. 201050167

Ketua Peneliti,



(Aditianata, ST., M.Si)
NIK. 214090547

Menyetujui,
Ketua LPPM



Universitas
Esa Unggul
LPPM

(Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc)
NIK. 209100388

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Analisa Kebutuhan Data Kebutuhan Pokok Dan Penentuan Harga Subsidi Dalam Rangka Operasi Pasar Murah (OPM) Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Di Kabupaten Bogor

2. Tim Peneliti

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Aditianata, ST., M.Si	Ketua	Perencanaan Wilayah dan Kota	Universitas Esa Unggul	10 jam

3. Objek Penelitian (Jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian)

Objek Penelitian adalah data kebutuhan pokok dan besaran harga subsidi dalam penyelenggaraan Operasi Pasar pada Kabupaten Bogor.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan : Maret Tahun : 2020

Berakhir : Bulan : September Tahun : 2020

5. Usulan Biaya

• Tahun ke-1 : Rp. 5.000.000,-

• Tahun ke-2 : Rp. -

• Tahun ke-3 : Rp. -

6. Lokasi Penelitian (Lab/Studio/lapangan) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)

8. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, produk atau rekayasa)

Pengembangan data kebutuhan bahan pokok dan besaran subsidi pada operasi pasar di Kabupaten Bogor.

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinil yang akan mendukung pengembangan iptek)

Data Kebutuhan pokok Kabupaten Bogor dan kisaran harga subsidi

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun berapa rencana publikasi)

Jurnal Nasional tidak terakreditasi : Jurnal Planesa; Rencana Publikasi tahun 2021.

11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya.

.....

RINGKASAN

Seksi Pengadaan dan Penyaluran Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tugas memberikan rasa aman kepada masyarakat mengenai barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar. Rasa aman tersebut di berikan kepada masyarakat antara lain dengan diperolehnya informasi terkait analisa kebutuhan data kebutuhan pokok dalam rangka Operasi Pasar Murah (OPM) kebutuhan masyarakat yang meliputi beberapa jenis komoditi, seperti Besar, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging Sapi, Tepung Terigu dan Daging Ayam, Seksi Pengadaan dan Penyaluran Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, akan melakukan analisa barang kebutuhan pokok bekerjasama dengan pihak ketiga yang meliputi dari beberapa jenis komoditi, jumlah sasaran rumah tangga miskin (RTM) di 40 Kecamatan, Harga Subsidi (Maksimal) dan teknis pendistribusian Operasi Pasar Murah (OPM). Jenis komoditas yang disediakan untuk kegiatan Pasar Murah meliputi Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging Sapi, Tepung Terigu, Daging Ayam dan Besaran subsidi ditetapkan sebagai berikut untuk beras sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogram atau sebesar 15%; untuk gula pasir Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilogram atau sebesar 27%; untuk minyak goreng sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per liter atau sebesar 17%; untuk daging sapi sebesar Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) per kilogram 26%; untuk tepung terigu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram 12%; dan untuk daging ayam sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per kilogram 23%.

Kata Kunci : operasi pasar murah, harga subsidi, barang pokok.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seksi Pengadaan dan Penyaluran Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tugas memberikan rasa aman kepada masyarakat mengenai barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar. Rasa aman tersebut di berikan kepada masyarakat antara lain dengan diperolehnya informasi terkait analisa kebutuhan data kebutuhan pokok dalam rangka Operasi Pasar Murah (OPM) kebutuhan masyarakat yang meliputi beberapa jenis komoditi, seperti Besar, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging Sapi, Tepung Terigu dan Daging Ayam, Seksi Pengadaan dan Penyaluran Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, akan melakukan analisa barang kebutuhan pokok bekerjasama dengan pihak ketiga yang meliputi dari beberapa jenis komoditi, jumlah sasaran rumah tangga miskin (RTM) di 40 Kecamatan, Harga Subsidi (Maksimal) dan teknis pendistribusian Operasi Pasar Murah (OPM).

Kegiatan ini merupakan kajian Analisa yang menjadi dasar dalam implementasi Operasi Pasar Murah (OPM) yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada pada wilayah Kabupaten Bogor.

Kemudian dasar hukum yang menjadi dasar dalam kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Primbangan Keuangan Pusat-Daerah.
2. Peraturan Mentri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor

5. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) satuan kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2019.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, Rasa aman tersebut di berikan kepada masyarakat antara lain dengan diperolehnya informasi terkait analisa kebutuhan data kebutuhan pokok dalam rangka Operasi Pasar Murah (OPM) kebutuhan masyarakat yang meliputi beberapa jenis komoditi, seperti Besar, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging Sapi, Tepung Terigu dan Daging Ayam. Perlu dilakukan analisa barang kebutuhan pokok bekerjasama dengan pihak ketiga yang meliputi dari beberapa jenis komoditi, jumlah sasaran rumah tangga miskin (RTM) di 40 Kecamatan, Harga Subsidi (Maksimal) dan teknis pendistribusian Operasi Pasar Murah (OPM). Berdasarkan permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini memiliki pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang merupakan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor terkait dengan bahan pokok?
2. Berapa estimasi harga subsidi bahan pokok yang bisa dianggarkan dalam operasi pasar di Kabupaten Bogor?

1.3 Maksud Penelitian

Maksud dilaksanakannya kegiatan Analisa terkait barang kebutuhan pokok, dalam rangka Operasi Pasar Murah (OPM) sesuai kebutuhan masyarakat di Wilayah Kabupaten Bogor, antara lain melakukan analisa terkait komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kemudian menjadi komoditi yang disiapkan dalam Operasi Pasar Murah, komoditi tersebut adalah Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging, Tepung Terigu, Daging Ayam.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

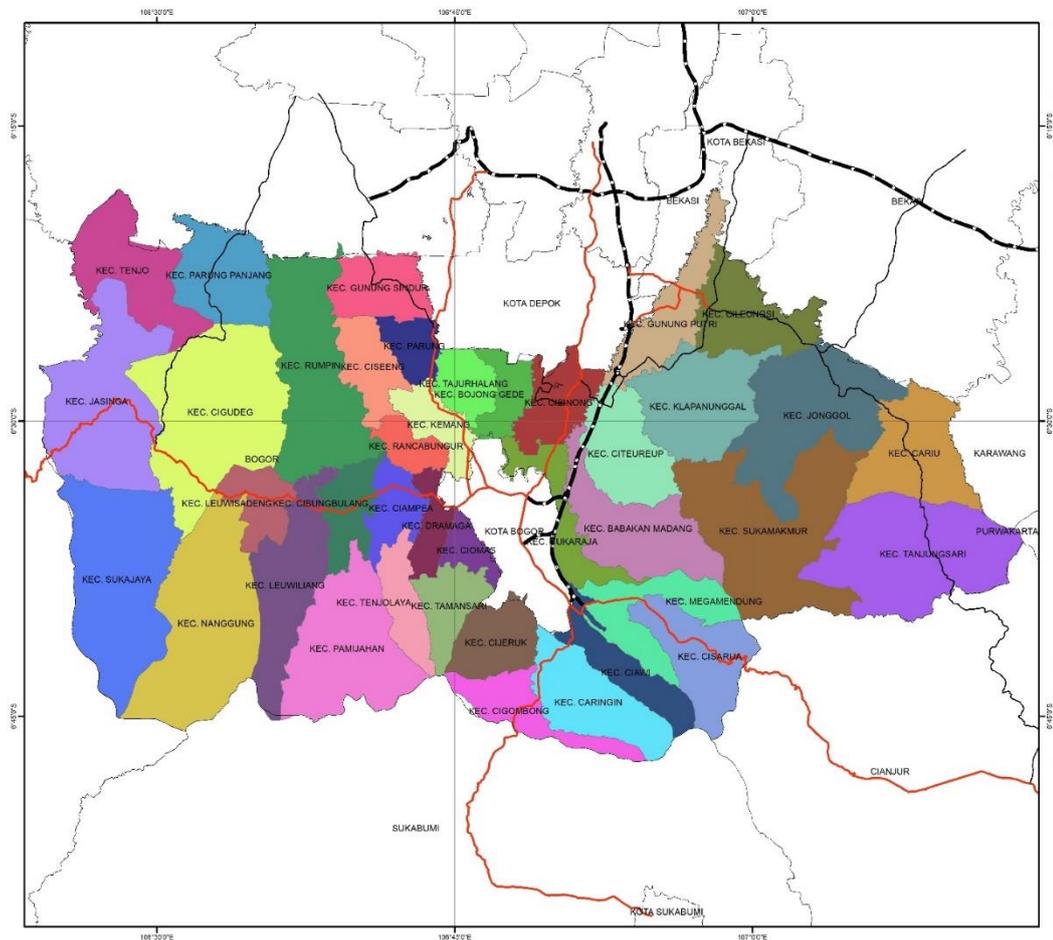
1. Meningkatnya efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

2. Terdapatnya informasi harga barang kebutuhan pokok, kebutuhan Masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor.
3. Terciptanya ketenangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di wilayah Kabupaten Bogor.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah kajian dalam kegiatan Belanja Jasa Konsultan Analisa Terkait Kebutuhan Data Kebutuhan Pokok dalam Rangka Operasi Pasar Murah (OPM) Kebutuhan Masyarakat berada pada Kabupaten Bogor yang mencakup 40 Kecamatan.



Gambar 1.1.
Peta Wilayah Kabupaten Bogor

1.5.2 Ruang Lingkup Substansi

Lingkup substansi dalam kegiatan Belanja Jasa Konsultan Analisa Terkait Kebutuhan Data Kebutuhan Pokok dalam Rangka Operasi Pasar Murah (OPM) Kebutuhan Masyarakat mencakup:

- Studi Teknis terhadap berbagai faktor menyangkut hasil analisa kebutuhan pokok yang meliputi dari 5 (lima) jenis komoditi;
- Studi Teknis terhadap hasil analisa kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka Operasi Pasar Murah (OPM);
- Pendataan terhadap obyek jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM) di wilayah Kabupaten Bogor;
- Menganalisa harga subsidi (maksimal) yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten;
- Studi teknis terhadap pendistribusian Operasi Pasar Murah (OPM).

1.6 Luaran

Luaran wajib dari penelitian ini adalah publikasi berupa satu artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional tidak terakreditasi dan laporan penelitian.

Tabel 1.1
Rencana Target Capaian Tahunan

No.	Jenis Luaran				Indikator Capaian		
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS ¹⁾	TS+1	TS+2
1	Artikel Ilmiah dimuat di Jurnal ²⁾	Internasional bereputasi					
		Nasional bereputasi					
		Nasional tidak terakreditasi	√		<i>accepted</i>		
2	Artikel Ilmiah dimuat di Prosiding ³⁾	Internasional terindeks					
		Nasional					
3	<i>Invited Speaker</i> dalam temu ilmiah ⁴⁾	Internasional					
		Nasional					
4	<i>Visiting Lecturer</i> ⁵⁾	Internasional					
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ⁶⁾	Paten					
		Paten Sederhana					
		Hak Cipta					
		Merek Dagang					
		Rahasia Dagang					
		Desain Produk Industri					
		Indikasi Geografis					
		Perlindungan Varietas Tanaman					

		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu					
6	Teknologi Tepat Guna ⁷⁾						
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial ⁸⁾						
8	Buku Ajar (ISBN) ⁹⁾						
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) ¹⁰⁾						
¹⁾ TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian) ²⁾ Isi dengan tidak ada, draft <i>submitted, reviewed, accepted, atau published</i> ³⁾ Isi dengan tidak ada, draft, terdaftar, atau sudah dilaksanakan ⁴⁾ Isi dengan tidak ada, draft, terdaftar, atau sudah dilaksanakan ⁵⁾ Isi dengan tidak ada, draft, terdaftar, atau sudah dilaksanakan ⁶⁾ Isi dengan tidak ada, draft, terdaftar, atau <i>granted</i> ⁷⁾ Isi dengan tidak ada, draft, produk, atau penerapan ⁸⁾ Isi dengan tidak ada, draft, produk, atau penerapan ⁹⁾ Isi dengan tidak ada, draft, atau proses <i>editing</i> , atau sudah terbit ¹⁰⁾ Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Lampiran A							

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemahaman Terhadap Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Pokok

Belum Ada berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan atau penurunan harga. Namun, mekanisme harga kebutuhan pokok komoditas pertanian, tetap berjalan berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Ketika permintaan lebih besar dari penawaran maka harga akan naik, begitu juga sebaliknya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran yang menyebabkan kenaikan atau penurunan harga diantaranya:

1. Faktor Alam

Ketika keadaan alam “mendukung”, panen berlimpah, penawaran naik, harga bahan pokok komoditas pertanian di tingkat petani menjadi murah. Ketika alam sedang dalam penyesuaian, kekeringan, banjir, adanya suatu organisme tumbuhan maupun hewan yang menjadi hama, dan lainnya yang menyebabkan gagal panen, penawaran turun, harga berpotensi naik.

2. Hambatan pada Rantai Nilai

Pada umumnya, rantai nilai bahan pokok komoditas pertanian tidak efisien. Jika tidak melalui jalur distribusi/perdagangan dengan rantai nilai yang panjang, adanya pelaku yang dominan pada rantai nilai yang pendek juga dapat menyebabkan ketidak-efisienan. Pada rantai nilai yang panjang, bahan pokok dapat tertahan di beberapa level rantai nilai, baik karena hambatan distribusi, atau perilaku perdagangan yang biasanya pelaku perdagangan tiap rantai nilai menerapkan stok barang. Indikator adanya hambatan pada rantai nilai yang berpengaruh terhadap harga, ketika harga ditingkat petani tetap, tetapi harga ditingkat konsumen sudah melambung tinggi.

3. Faktor Ekspor-Import

Ekspor bahan pokok komoditas pertanian menyebabkan kelangkaan barang ditingkat konsumen, sehingga harga naik. Sebaliknya, impor menyebabkan penawaran

bertambah sehingga harga turun. Salah satu contohnya kopi, ketika harga kopi di luar bagus, permintaan ekspor meningkat, otomatis harga kopi domestik naik.

4. Peristiwa Sosial-Budaya

Hari raya, tahun baru dan lainnya merupakan peristiwa sosial-budaya yang menyebabkan peningkatan permintaan, sehingga harga kebutuhan pokok komoditas pertanian naik. Kenaikan harga pada peristiwa itu utamanya disebabkan oleh perilaku masyarakat. Selain itu, peristiwa sosial yang menyebabkan harga bahan pokok komoditas pertanian naik diantaranya adanya perang atau kerusuhan. Peristiwa itu menyebabkan ekonomi lumpuh, distribusi tersendat, sehingga terjadi kelangkaan pangan.

5. Faktor Harga Barang Lainnya

Kenaikan harga barang lainnya yang berpengaruh terhadap bahan pokok komoditas pertanian diantaranya, barang substitusi, barang komplementer, dan input faktor produksi bahan pokok komoditas pertanian. Pupuk, obat, tenaga kerja, mesin sebagai input pertanian berpengaruh langsung terhadap harga di tingkat petani, yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan atau penurunan harga ditingkat konsumen. Harga gula merah naik ketika harga gula pasir naik, atau makanan pengganti beras naik ketika beras langka, sulit dijangkau atau didapat.

6. Inflasi

Inflasi adalah naiknya seluruh harga dan berlangsung terus-menerus. Intinya, inflasi ini menjadi cerminan mahal atau murahnya harga-harga di suatu negara. Beberapa hal yang menyebabkan inflasi adalah (a.) Permintaan tinggi, suplai rendah (*demand pull inflation*); (b.) Ongkos produksi naik (*cost push inflation*). Sementara komponen yang mempengaruhi dua penyebab inflasi tersebut adalah naiknya kebutuhan pokok (*volatile foods*), Pengaturan harga oleh pemerintah (*administered price*), Campuran Bank Indonesia (BI), dan Naiknya harga barang impor (*imported inflation*).

Ketersediaan Input dan Stabilitas Harga, Dalam rantai nilai perdagangan bahan pokok komoditas pertanian, petani selalu menjadi pelaku yang mempunyai bargaining position yang paling lemah, sehingga ketika terjadi kenaikan harga, jarang sekali merasakannya. Ketersediaan input dan stabilitas harga lebih menguntungkan petani dari pada kenaikan

harga sesaat. Bagi pedagang bahan pokok komoditas pertanian pun sama, dilevel manapun pada sebuah rantai nilai perdagangan, kenaikan harga akan menggerus modal, penurunan harga berpotensi menyebabkan kerugian.

2.2. Pemahaman Terhadap Kemiskinan terkait dengan Rumah Tangga Miskin (RTM)

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Kemudian Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

α = 1

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

α = 2

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Kriteria Rumah Tangga Miskin adalah sebagai berikut :

1. Luas lantai rumah kurang dari 8 M²
2. Jenis lantai rumah tidak permanen
3. Jenis tembok rumah tidak permanen

4. Tidak memiliki sanitasi atau sanitasi bersama
5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ sumber air yang tidak terlindungi/air hujan.
7. Konsumsi daging sapi/susu/ayam sekali seminggu
8. Konsumsi makanan lebih dari 80% pendapatan
9. Pendapatan informal kurang dari Rp. 350.000/month
10. Tidak memiliki tabungan atau barang yang bernilai diatas Rp. 500.000

2.3. Pengaruh Pajak dan Subsidi pada Keseimbangan Harga Pasar

Terciptanya keseimbangan harga pasar disebabkan karena adanya interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Sekarang bagaimana jika ada sektor lain yang ikut berinteraksi dalam terciptanya harga keseimbangan tersebut, yaitu sektor pemerintah melalui pengenaan pajak dan subsidi? Pengenaan pajak oleh pemerintah akan mempengaruhi keseimbangan harga pasar yaitu akan menggeser kurva penawaran ke kiri sehingga harga akan naik dan jumlah barang yang diminta konsumen berkurang. Demikian juga jika pemerintah memberikan subsidi juga akan mempengaruhi harga keseimbangan pasar yaitu menggeser kurva penawaran ke kanan sehingga harga akan turun dan jumlah barang yang diminta konsumen bertambah. Mengapa yang bergeser kurva penawaran bukan kurva permintaan? Karena pengaruh pengenaan pajak dan subsidi pada harga terletak pada penentuan harga pada produsen sebagai sektor yang mengusahakan barang dan jasa.

Penjelasan pengaruh pajak dan subsidi terhadap harga keseimbangan pasar dapat dijelaskan lebih mudah melalui pendekatan matematis seperti dibawah ini. Secara matematis kurva permintaan memiliki persamaan sebagai berikut :

$$Q_d = a - b P_d$$

atau

$$P_d = (a/b) - (1/b)Q_d$$

Q_d = Jumlah barang atau jasa yang diminta

P_d = Harga permintaan

Secara matematis kurva penawaran memiliki persamaan sebagai berikut :

$$Q_s = a + b P_s$$

atau

$$P_s = -(a/b) + (1/b)Q_s$$

Q_s = Jumlah barang atau jasa yang ditawarkan

P_s = Harga penawaran

Keseimbangan harga tercapai jika :

$$Q_d = Q_s \text{ dan } P_d = P_s$$

Fungsi Penawaran dengan adanya Pengenaan Pajak (T_x) dan Subsidi (S_b) :

$$P_s = -(a/b) + (1/b)Q_s + T_x \text{ (Implikasi Pajak menaikkan harga)}$$

$$P_s = -(a/b) + (1/b)Q_s - S_b \text{ (Implikasi Subsidi menurunkan harga)}$$

Menurut Suparmoko, subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat bersifat langsung (dalam bentuk tunai, pinjaman bebas bunga, dan lain-lain) atau tidak langsung (pembebasan penyusutan, potongan sewa, dan lain-lain).

Leo Kusuma menjelaskan dalam blognya, bahwa pengertian subsidi dalam pendekatan kebijakan pemerintah memiliki perspektif yang berbeda dengan definisi menurut ilmu ekonomi. Sasarannya masih sama, yaitu harga. Dalam hal ini, kebijakan subsidi bertujuan untuk menekan harga penjualan di bawah harga yang umumnya berlaku. Harga jual bisa memiliki dua pengertian, yaitu harga jual yang ditetapkan oleh produsen atau harga jual yang mengikuti harga pasar (market price). Harga jual dalam arti ditetapkan atau ditentukan oleh produsen merupakan harga pokok ditambahkan besarnya keuntungan yang dikehendaki. Besarnya subsidi bisa jadi menggantikan tambahan keuntungan atau tambahan keuntungan ditambah beberapa ongkos produksi yang terhitung pada harga

pokok. Ilustrasi tersebut merupakan mekanisme subsidi harga dalam APBN yang digambarkan Leo Kusuma seperti dilihat pada gambar di bawah ini.



Kebijakan pemberian subsidi biasanya dikaitkan kepada barang dan jasa yang memiliki positif eksternalitas dengan tujuan agar untuk menambah output dan lebih banyak sumber daya yang dialokasikan ke barang dan jasa tersebut. Dalam APBN, Belanja Subsidi dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain:

Subsidi Energi	Subsidi Non-Energi
<ul style="list-style-type: none"> • Subsidi Bahan Bakar Minyak • Subsidi Bahan Bakar Nabati • LPG Tabung 3 kg • LGV • Subsidi Listrik 	<ul style="list-style-type: none"> • Subsidi Pertanian <ul style="list-style-type: none"> • Subsidi Pangan • Subsidi Benih • Subsidi Pupuk • Subsidi Bunga Kredit Program • Subsidi Pajak/DTP • Subsidi Lainnya

Secara umum pelaksanaan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri;

2. Memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah;
3. Meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat;
4. Meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya;
5. Menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan dalam jumlah yang mencukupi, dengan harga yang stabil, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
6. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa didalam negeri;

Meskipun subsidi ini memiliki banyak manfaat bagi usaha-usaha dan kepentingan masyarakat, tetapi subsidi juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya:

1. Subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Karena konsumen membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar maka ada kecenderungan konsumen tidak hemat dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi. Karena harga yang disubsidi lebih rendah daripada biaya kesempatan (*opportunity cost*) maka terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang yang disubsidi.
2. Subsidi menyebabkan distorsi harga. Menurut Basri, subsidi yang tidak transparan dan tidak well-targeted akan mengakibatkan:
 - a. Subsidi besar yang digunakan untuk program populis cenderung menciptakan distorsi baru dalam perekonomian
 - b. Subsidi menciptakan suatu inefisiensi
 - c. Subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang berhak
3. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar.
4. Mematikan para pesaing, dalam arti pihak swasta yang dirugikan.

2.4. Pemahaman Terhadap Operasi Pasar Murah (OPM)

Kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) kebutuhan pokok merupakan aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan yang dilakukan oleh penyedia komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten. Kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) Kebutuhan Pokok (kepok) ini merupakan salah satu bentuk antisipasi bahwa setiap menjelang Hari Raya, hukum

ekonomi selalu berlaku. Ketika permintaan terhadap barang utamanya kebutuhan pokok meningkat, maka harga - harga dipastikan juga ikut naik, bahkan di beberapa Daerah, terutama yang transportasinya sulit, barang - barang kebutuhan pokok tidak hanya harganya mahal, tetapi barangnya juga tidak tersedia.

Kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) Kebutuhan Pokok (kepok) memiliki nilai yang dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu sebagai berikut: Pertama: dimensi agama. Artinya kegiatan pasar murah ini adalah bentuk ibadah sosial yang kita harapkan memiliki nilai ibadah di sisi Allah SWT. Kedua: dimensi ekonomi. Pasar murah ini diharapkan mampu meringankan beban hidup masyarakat yang kurang beruntung pada khususnya dan seluruh masyarakat. Ketiga: dimensi sosial. Pada dasarnya kegiatan seperti ini merupakan bentuk perasaan senasib-sepenanggungan. Kegiatan seperti ini adalah wujud konkrit semangat kebersamaan dan kegotong royongan yang selama ini telah terbangun dan terpelihara baik di dalam masyarakat, saling membantu, saling peduli, dan saling berbagi dapat terus kita perkuat.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) ini adalah, sebagai berikut :

- a) Membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui subsidi yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor;
- b) Mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang semakin memperberat beban masyarakat, yang berdampak semakin tingginya inflasi.

BAB 3

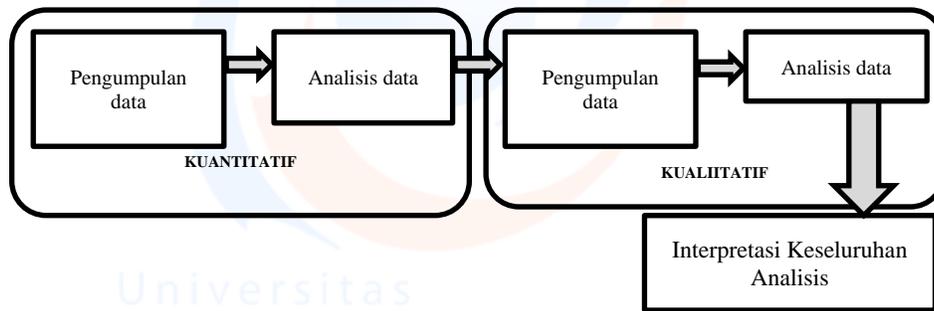
METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu kerangka pendekatan yang merupakan hasil pola pemikiran dalam menyusun suatu studi. Metodologi penelitian sendiri merupakan ilmu yang mempelajari metoda-metoda penelitian dan ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Sehingga pada bab ini akan dijelaskan tahapan penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data dan analisis penelitian.

Metode penelitian adalah rangkaian prosedur untuk mencapai tujuan penelitian yang sistematis, rasional dan empiris. Dengan menggunakan metode yang tepat akan membantu peneliti dalam memahami masalah, memecahkan hingga mengantisipasi masalah yang diteliti dengan langkah-langkah yang tepat dan sistematis untuk mencapai tujuan penelitian.

Dalam mencapai tujuan penelitian ini, metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran (*Mixed Methodology*). *Mixed Method* adalah metode yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam hal metodologi (dalam tahap pengumpulan data), dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian (Abbas, 2010: VIII). *Mixed Method* juga disebut sebagai sebuah metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam menunjukkan arah memberikan petunjuk cara pengumpulan data dan menganalisa data serta panduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa tahap proses penelitian.

Startegi metode campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah urutan analisis kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi komponen konsep (subkonsep) melalui analisis data kuantitatif dan kemudian mengumpulkan data kualitatif guna memperluas informasi yang tersedia (Abbas, 2010:222). Dengan kata lain metode ini untuk menggabungkan dua jenis data (kuantitatif dan kualitatif) untuk memperoleh analisis lebih lengkap. Sebagaimana gambar ekplanatoris sekuesial berikut:



Gambar 3. 1
Sistematika Metode Penelitian Campuran (*Mixed Methode*)

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan tujuan untuk membuat dekskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nasir, 1999:63).

3.1. Tahapan Penelitian

Sebagaimana halnya sebuah penelitian, maka studi ini pun melakukan proses tersebut. Studi ini diawali pengamatan terhadap gejala sosial yang terjadi, fenomena yang kemudian menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Penelaahan dilakukan melalui studi literatur guna mencari berbagai referensi yang terkait dengan topik yang diteliti. Literatur yang digunakan berupa pendapat, data, kasus-kasus yang serupa serta teori dan konsep terkait. Penelaahan literatur menghasilkan sintesa yang kemudian diuraikan dalam bentuk variabel model. Untuk sampai pada tujuan maka penelitian ini berpegang pada kerangka penelitian yang termasuk didalamnya metode-metode penelitian yang tepat untuk digunakan. Metode penelitian tersebut merupakan alat bantu agar penelitian dilakukan secara sistematis dan sesuai tujuan sasaran. Hal tersebut juga membantu dalam aktivitas di lapangan sekaligus meminimalisir besarnya biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Hasil akhirnya berupa temuan yang dianalisis dengan keluaran berupa rekomendasi.

Pada tahap teoritis di studi ini akan dilakukan penelaahan kasus-kasus serupa untuk menggali permasalahan secara umum, kemudian akan di komparasikan dengan teori-teori dan konsep yang terkait yaitu konsep penawaran dan permintaan yang mempengaruhi harga bahan pokok. Pada tahapan empiris, metodologi akan dijabarkan melalui pendekatan *mix method* yang menurut Tashakkori dan Teddlie (2003) yaitu “mixing” berarti menyelidiki suatu studi melalui integrasi, sintesa, metode kualitatif dan kuantitatif, multi

method dan multimethodologi. Hal ini dimaknai bahwa terdapat sumbangan kuantitatif dan kualitatif terutama dalam pengumpulan data dan interpretasi pada studi ini. Metode yang digunakan adalah studi kasus karena berusaha menginterpretasikan hasil investigasi suatu kasus. Untuk memenuhi kebutuhan data maka dilakukan studi lapangan yaitu observasi, sampling kuesioner, wawancara dan pengumpulan data sekunder, kemudian dilakukan pengolahan data sebagai masukan untuk bahan analisis. Analisis merupakan penjabaran fakta yang dikomparasikan dengan teori. Analisis berpedoman pada kerangka analisis yang merupakan pemaparan operasionalisasi model. Hasil dari analisis adalah temuan studi berisi fakta-fakta di lapangan yang bermuara akhir pada sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban pertanyaan penelitian sekaligus dialog antara teori, hipotesis dan fakta. Rumusan terakhir berupa rekomendasi sebagai pen jembatan antara kondisi eksisting dan kondisi yang diharapkan.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan studi penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai kebutuhan analisa untuk mencapai tujuan dari penelitian. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penulis, adalah:

a. Pendekatan Teori.

Pendekatan teoritis merupakan pendekatan studi yang didasarkan pada berbagai bentuk dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan substansi kajian, yaitu berbagai referensi, literatur dan dokumen lain.

Pendekatan teoritis digunakan karena substansi terkait infrastruktur dan ketahanan air yang merupakan substansi penelitian analisis infrastruktur dalam mendukung ketahanan air di Provinsi Banten, merupakan bidang keilmuan yang memiliki berbagai referensi, literatur dan dokumen pustaka lain dari berbagai sumber.

Berbagai referensi, literatur dan dokumen lain yang digunakan dalam pendekatan teoritis pada penelitian Analisa Kebutuhan Data Kebutuhan Pokok Dan Penentuan Harga Subsidi Dalam Rangka Operasi Pasar Murah (OPM) Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Di Kabupaten Bogor antara lain yaitu:

1. Berbagai dokumen kebijakan yang berkaitan dengan substansi kajian harga subsidi dan ketersediaan barang pokok
 2. Berbagai dokumen hasil kajian yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan harga subsidi dan ketersediaan barang pokok, seperti:
 - a. Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bogor;
 - b. Harga barang-barang pokok di Kabupaten Bogor dalam satu tahun terakhir;
 3. Berbagai dokumen literatur yang berkaitan dengan substansi kajian Infrastruktur terkait ketahanan air, seperti:
 - a. Literatur mengenai harga subsidi
 - b. Literatur mengenai kemiskinan/rumah tangga miskin
 - c. Literatur mengenai barang pokok
 - d. Literatur terkait lainnya.
- b. Pendekatan lapangan

Pendekatan lapangan pada prinsipnya memandang objek wilayah penelitian sebagai satu kesatuan sistem. Keselarasan unsur pembentuk wilayah yang meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia beserta kegiatannya yang meliputi kegiatan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan, berinteraksi membentuk wujud pembangunan perumahan dan permukiman wilayah, baik yang direncanakan maupun tidak.

Mengingat wilayah adalah suatu sistem tempat manusia bermukim dan mempertahankan kehidupannya, maka dalam penataan ruang yang paling utama diwujudkan adalah meningkatkan kinerja atau kualitas ruang wilayah untuk penyediaan produksi barang dan jasa yang cukup, permukiman yang sehat dan kelestarian lingkungan hidup, namun yang paling utama adalah keberlanjutan kehidupan yang tercermin dalam ketahanan pangan, air dan energi.

Pendekatan lokasi merupakan pendekatan studi yang didasarkan pada karakteristik letak lokasi penyediaan barang pokok dalam konstelasi suatu kawasan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penelitian Analisa Kebutuhan Data Kebutuhan Pokok Dan Penentuan Harga Subsidi Dalam Rangka Operasi Pasar Murah (OPM) Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Di

Kabupaten Bogor, dimana dalam melihat suatu lokasi dan sebaran rumah tangga miskin tidak hanya pada keadaan eksisting, tetapi juga melihat kepada lokasi-lokasi yang memiliki potensi untuk sebagai lokasi operasi pasar untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bogor.

c. Pendekatan Campuran

Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisis dengan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh analisis yang lebih lengkap.

3.3. Data Penelitian

Sebelum aktivitas survei lapangan maka penentuan teknik pengumpulan data mutlak dibutuhkan. Agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai secara efektif dan efisien, maka pengumpulan data terbagi dua yaitu, pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan penelitian, untuk mendukung keberhasilan penelitian ini data diperoleh dari dua sumber:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan masyarakat, melalui:

1. Observasi, yakni pengumpulan data dengan melakukan pengamatan objek dan lokasi penelitian;
2. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya-jawab kepada masyarakat sebagai responden secara tulisan;
3. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya-jawab secara lisan kepada responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung penelitian, yaitu:

1. Studi literatur, yakni data yang diperoleh dari penelitian ilmiah yang telah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian;

3.4. Metode Analisis

Metode analisis data menggunakan metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, (Sugiyono: 2015).

Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contoh statistika deskriptif yang sering muncul adalah, tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Dengan Statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data.

Semua data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil kegiatan pengumpulan data dan survai kemudian dikompilasikan. Pada dasarnya kegiatan kompilasi data ini dilakukan dengan cara mentabulasi dan mengsystematisasi data-data tersebut dengan menggunakan cara komputerisasi.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya data dan informasi yang telah diperoleh sehingga akan mempermudah pelaksanaan kegiatan selanjutnya yaitu analisis. Penyusunan data itu sendiri akan dibagi atas dua bagian

Metoda pengolahan dan kompilasi data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a. Mengelompokan data dan informasi menurut kategori aspek kajian
- b. Menyortir data-data setiap aspek tersebut agar menjadi sederhana dan tidak duplikasi
- c. Mendetailkan desain pengolahan dan kompilasi data dari desain studi awal sehingga tercipta form-form isian berupa tabel-tabel, konsep isian,
- d. Mengisi dan memindahkan data yang telah tersortir ke dalam tabel-tabel isian
- e. Melakukan pengolahan data berupa penjumlahan, pengalihan, pembagian, prosentase dan sebagainya baik bagi data primer maupun sekunder

Setelah seluruh tabel terisi, maka langkah selanjutnya adalah membuat uraian deskriptif penjelasannya ke dalam suatu laporan yang sistematis per aspek kajian dan menuangkan informasi kedalam analisis konsep-konsep.

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Biaya Penelitian

Secara umum, anggaran biaya terbagi menjadi honorium peneliti, bahan habis pakai, perjalanan dan lain-lain. Berikut adalah rekapitulasi anggaran biaya yang diajukan dalam bentuk tabel dengan komponen sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Anggaran Biaya Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Gaji dan upah (Maks. 20%)	Rp. 1.000.000
2	Bahan habis pakai dan peralatan (40-60%)	Rp. 2.500.000
3	Perjalanan (Maks. 15%)	Rp. 750.000
4	Lain-lain (publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan)(10-15%)	Rp. 750.000
Jumlah		Rp. 5.000.000

4.2. Jadwal Penelitian

Penelitian Analisa Kebutuhan Data Kebutuhan Pokok Dan Penentuan Harga Subsidi Dalam Rangka Operasi Pasar Murah (OPM) Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Di Kabupaten Bogor dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan. Berikut adalah jadwal rencana penelitian yang diajukan:

Tabel 4.2
Jadwal Rencana Penelitian

	Tahun	2020								
		Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengajuan Proposal									
2	Persiapan pelaksanaan									
3	Pelaksanaan penelitian									
4	Pengumpulan dan Analisa data									
5	Penyusunan Laporan penelitian									
6	Publikasi ilmiah									

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Lokasi Sasaran Operasi Pasar Murah (OPM)

Dari hasil survey dilapangan dan hasil analisis bahwa untuk menentukan calon lokasi Operasi Pasar Murah (OPM) yang ada di Kabupaten Bogor dilihat antara lain dari sebaran jumlah kepala keluarga (KK) miskin dan persentase keluarga miskin maka diambil peringkat 10 (sepuluh) kecamatan sebagai calon lokasi operasi pasar murah (OPM), antara lain: Kecamatan Jasinga, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cigudeg, dan Kecamatan Rancabungur.

Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran jumlah keluarga miskin yang ada di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5. 1 Jumlah Keluarga Msikin di Kabupaten Tangerang Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Persentase
1.	Cibinong	149,017	8,217	5.51
2.	Bojonggede	117,564	5,526	4.70
3.	Tajurhalang	42,637	4,209	9.87
4.	Sukaraja	70,439	6,633	9.42
5.	Babakan madang	42,259	4,563	10.80
6.	Kemang	37,925	5,238	13.81
7.	Rancabungur	18,058	5,614	31.09
8.	Dramaga	37,215	7,429	19.96
9.	Ciomas	61,554	5,351	8.69
10.	Tamansari	35,091	5,924	16.88
11.	Cijeruk	29,392	8,740	29.74
12.	Cigombong	34,871	7,395	21.21
13.	Caringin	41,933	14,187	33.83
14.	Ciawi	39,475	7,776	19.70
15.	Megamendung	35,923	7,129	19.85
16.	Cisarua	41,575	7,826	18.82
17.	Citeureup	78,607	6,069	7.72
18.	Klapanunggal	42,088	6,910	16.42
19.	Gunung putri	158,499	4,347	2.74
20.	Cileungsi	122,094	5,554	4.55
21.	Parung	49,304	5,180	10.51
22.	Ciseeng	38,404	7,882	20.52
23.	Gunung sindur	45,171	4,666	10.33
24.	Ciampea	53,555	10,822	20.21

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Persentase
25.	Tenjolaya	19,431	6,901	35.52
26.	Cibungbulang	44,532	11,247	25.26
27.	Pamijahan	47,172	11,779	24.97
28..	Rumpin	46,810	11,506	24.58
29.	Leuwiliang	40,732	14,340	35.21
30.	Leuwisadeng	24,766	8,137	32.86
31.	Jonggol	50,984	11,591	22.73
32.	Sukamakmur	26,493	13,061	49.30
33	Cariu	15,128	3,900	25.78
34.	Tanjungsari	17,191	8,442	49.11
35.	Cigudeg	41,885	13,090	31.25
36.	Parung panjang	44,862	7,005	15.61
37.	Nanggung	28,912	9,901	34.25
38.	Sukajaya	19,230	9,704	50.46
39.	Jasinga	32,013	24,666	77.05
40.	Tenjo	23,862	7,885	33.04
		1,946,654	336,342	17.28

Sumber; Kabupaten Bogor dalam Angka 2019, diolah

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga miskin terbanyak berada di Kecamatan Jasinga dengan jumlah KK miskin sebanyak 77,05 persen, kemudian adalah Kecamatan Sukajaya dengan jumlah KK miskin sebanyak 50,46 persen, dan diposisi selanjutnya berada di Kecamatan Sukamakmur yaitu sebanyak 49,30 persen.

5.2 Analisis Kebutuhan Barang Pokok

Kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia terdiri dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pada zaman yang modern ini kebutuhan manusia semakin beragam. Hal tersebut tercermin pada tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan semakin meningkat, sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam hal menentukan mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder. Namun, dari sekian banyak kebutuhan manusia, kebutuhan pangan, sandang, dan papan masih menjadi kebutuhan pokok yang mesti selalu menempati urutan atas dalam hal permintaan kebutuhan masyarakat (Suryana: 2008).

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup, oleh karena itu kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu merupakan hak azazi yang harus dipenuhi (Ismet, 2007; Suryana, 2008). Sebagai kebutuhan dasar dan hakazazi manusia, pangan mempunyai peran yang sangat penting bagi daerah. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi suatu daerah bahkan negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat terjadi jika ketahanan pangan terganggu, yang pada akhirnya dapat membahayakan stabilitas nasional

(Ismet, 2007). Berdasar kenyataan tersebut masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat di suatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara.

Secara umum, ketahanan pangan mencakup 4 aspek, yaitu :

- a) Availability (ketersediaan), yaitu tersedianya pangan yang cukup yang sebagian besar berasal dari produksi sendiri.
- b) Accessibility (daya jangkau), yaitu akses atau keterjangkauan terhadap pangan yang dipengaruhi oleh akses fisik dan ekonomi terhadap pangan.
- c) Stability (stabilitas), yaitu stabilitas ketersediaan pangan sepanjang tahun, tanpa pengaruh musim.
- d) Kualitas konsumsi, yaitu kualitas konsumsi pangan serta keamanan pangan.

Selanjutnya pemenuhan kebutuhan pokok manusia itu berdasarkan kebutuhan akan 9 bahan pokok sebagai berikut, kebutuhan pokok minimum perkapita pertahun mencakup sembilan bahan pokok yang meliputi : beras 140 kg, ikan asin 15 kg, gula pasir 3,5 kg, tekstil kasar 4 meter, minyak goreng 6 kg, minyak tanah 60 liter, sabun 20 kg, dan garam 9 kg, maka dibutuhkan harga yang berlaku pada saat ini di daerah yang diteliti. Kebutuhan tiap daerah tentu berbeda-beda meskipun secara garis besar kebutuhan pokok manusia itu sama. Akan tetapi dengan adanya keunggulan komparatif pada tiap-tiap daerah tentu memiliki prioritas yang berbeda terhadap suatu kebutuhan.

Untuk memperoleh data kebutuhan bahan pokok pada 10 kecamatan prioritas di Kabupaten Bogor, maka dilakukan penyebaran kuesioner. Dengan jumlah sampel sebagai berikut di masing-masing kecamatannya. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus slovin, dengan margin of error adalah 5% atau 0,05.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

N = Populasi

e = *margin of error*

Tabel 5. 2 Hasil Perhitungan Sampel pada 10 Kecamatan Prioritas di Kabupaten Bogor

NO	Kecamatan Prioritas	Jumlah Penduduk	Persentase Jumlah Penduduk	Jumlah Sampel
1	Jasinga	96.040	11%	45
2	Sukajaya	57.691	7%	27
3	Sukamakmur	79.479	9%	37
4	Tanjungsari	51.571	6%	24
5	Tenjolaya	58.929	7%	27
6	Leuwiliang	122.195	14%	57
7	Nanggung	86.736	10%	40
8	Caringin	125.799	15%	59
9	Cigudeg	125.654	15%	59
10	Ranca Bungur	54.174	6%	25
Populasi		858.268	100%	400

Sumber : diolah dari data kependudukan, 2020

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner yang telah dilakukan sebelumnya dapat diketahui kebutuhan pokok pada 10 kecamatan prioritas pada Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 3 Kebutuhan Bahan Pokok pada 10 Kecamatan Prioritas di Kabupaten Bogor

N O	KECAMATAN N	KEBUTUHAN BAHAN POKOK					
		BERAS	GULA PASIR	MINYAK GORENG	DAGING SAPI	TEPUNG TERIGU	DAGING AYAM
1	Jasinga	1	2	4	6	3	5
2	Sukajaya	2	3	1	6	4	5
3	Sukamakmur	3	2	1	5	4	6
4	Tanjungsari	1	3	2	6	4	5
5	Tenjolaya	2	1	3	6	5	4
6	Leuwiliang	1	3	4	6	2	5
7	Nanggung	1	2	3	5	4	6
8	Caringin	1	3	4	5	2	6
9	Cigudeg	2	1	3	4	5	6
10	Ranca Bungur	1	3	2	6	4	5

Sumber : diolah dari hasil kusioner, 2020

Berdasarkan hasil identifikasi dari hasil penyebaran kuesioner maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan komoditi bahan pokok pada 10 Kecamatan prioritas adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Kebutuhan Komoditi Bahan Pokok

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN BAHAN POKOK
1	Jasinga	Beras, Gula Pasir, Tepung Terigu, Minyak Goreng
2	Sukajaya	Minyak Goreng, Beras, Gula Pasir, Tepung Terigu
3	Sukamakmur	Minyak Goreng, Gula Pasir, Beras, Tepung Terigu
4	Tanjungsari	Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu
5	Tenjolaya	Gula Pasir, Beras, Minyak Goreng, Daging ayam

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN BAHAN POKOK
6	Leuwiliang	Beras, Tepung Terigu, Gula Pasir, Minyak Goreng
7	Nanggung	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung Terigu
8	Caringin	Beras, Tepung Terigu, Gula Pasir, Minyak Goreng
9	Cigudeg	Gula Pasir, Beras, Minyak Goreng, Daging Sapi
10	Ranca Bungur	Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu

Sumber : hasil analisis, 2020

5.3 Analisis Harga Subsidi Maksimal Dalam Rangka Operasi Pasar Murah (OPM)

Harga pangan merupakan salah satu aspek dalam ekonomi pangan yang selalu dimonitor oleh pemerintah secara berkala karena bila terjadi kenaikan harga yang tajam berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Menurut Rachman (2005), ada lima tujuan yang ingin dicapai pemerintah terkait dengan kebijakan harga pangan, yaitu:

- 1) Meningkatkan pendapatan petani,
- 2) meningkatkan insentif kepada petani kecil agar tetap memproduksi bahan pangan,
- 3) mengurangi ketergantungan akan impor dan mencapai swasembada pangan,
- 4) menjaga kestabilan harga dan
- 5) menaruh perhatian pada daya beli masyarakat sehingga kebutuhan pangan terjamin.

Terkait daya beli, kenaikan harga pangan akan berdampak lebih besar terhadap kelompok masyarakat berpendapatan tetap yang rendah (miskin) sehingga akan berisiko tinggi terhadap nutrisi dan kerawanan pangan (*food insecurity*). Lebih lanjut, hasil penelitian Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri (Puska Dagri) (2011) menunjukkan bahwa sebesar 64% pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah di perkotaan dan pedesaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sedangkan pengeluaran rata-rata rumah tangga untuk konsumsi 10 bahan pangan pokok mencapai lebih dari 38% dari pendapatannya (Puska Dagri, 2011).

Lebih lanjut, dua pertiga orang miskin bukan petani beras dan sebagian besar petani adalah net konsumen beras akibat keterbatasan kepemilikan lahan. Oleh karena itu, dampak kenaikan harga beras terhadap orang miskin sangat besar (Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2008). Selain itu, naik turunnya harga pangan pokok berpengaruh terhadap tinggi rendahnya inflasi yang terjadi, dan pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat terutama bagi yang memiliki penghasilan rendah. Dari hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2017, konsumsi komoditas beras yang merupakan pangan pokok utama, mempunyai peranan yang cukup besar dalam penghitungan dengan pangsa sekitar 4%. Bahkan pada bulan Juli 2017 peranan beras sudah mencapai 5% yang disebabkan oleh kenaikan harga beras yang melebihi kenaikan harga komoditas lain.

Dalam kaitannya dengan upah, Setiaji (2008) mengemukakan bahwa upah riil meningkat 5 kali lipat selama satu dekade terakhir, sedangkan harga-harga barang secara umum meningkat sebanyak 3,6 kali. Namun begitu, jika analisis difokuskan pada pengeluaran belanja kelompok miskin terhadap bahan pangan beras, maka kenaikan harga beras juga hampir mencapai 5 kali lipat pada periode yang sama. Dengan demikian, daya beli kelompok masyarakat tersebut tidak mengalami peningkatan. Lebih lanjut, kelompok masyarakat yang akan terkena dampak paling buruk dari kenaikan harga pangan adalah rumah tangga miskin dan rumah tangga dengan keterbatasan aset (Zezza, Davis, Azzarri, Covarrubias, Tasciotti, Anriquez, 2009).

Mengingat hal tersebut, analisis mengenai dampak dinamika harga bapak terhadap daya beli perlu dilakukan. Tidak seperti pendekatan pengeluaran yang digunakan oleh Puska Dagri (2011), untuk menggambarkan dampak kenaikan harga pangan, pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan daya beli dengan membandingkan dinamika upah dan harga bapak, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan tetap. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat diperkirakan tingkat daya beli sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

Tingkat daya beli yang dimaksud adalah tingkat daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan atau upah dibandingkan dengan harga-harga barang dan jasa dan tingkat pendapatan. Dalam hal ini, untuk kelompok masyarakat tertentu yang pendapatannya cenderung tetap atau rendah, maka naik turunnya harga akan berdampak besar terhadap daya beli mereka terutama bapak. Dari hasil analisis ini diharapkan akan terlihat gambaran daya beli masyarakat terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan bahan pokok tersebut.

Dalam menentukan kemampuan daya beli masyarakat dan besar subsidi yang akan diberikan hendaknya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang berorientasi kepada kemauan dan kemampuan daya beli masyarakat (*ability and willingness to pay*). Untuk mengetahui kemampuan dan kemauan membayar tersebut perlu dilakukan analisis keterjangkauan daya beli masyarakat dalam membayar bahan pokok yang meliputi analisis kemauan membayar (*willingness to pay*) dan analisis kemampuan membayar (*ability to pay*) terhadap harga yang berlaku.

Metode yang akan digunakan dalam melakukan analisis keterjangkauan daya beli masyarakat dalam membayar bahan pokok ini adalah:

1. Pendekatan alokasi pendapatan keluarga (*household budget*) dalam penentuan ATP;
2. Pendekatan persepsi pemakai air bersih dalam menentukan WTP.

Pendapatan keluarga dan alokasinya di sebutkan dalam *Pareto Law* merupakan teori yang menyatakan bahwa pola distribusi pendapatan adalah konstan, baik secara historis maupun geografis, tanpa memperhatikan kebijakan perpajakan atau kesejahteraan. Nilai ATP umum diperoleh dari rasio alokasi pendapatan keluarga untuk biaya dalam memenuhi kebutuhan pokok terhadap total kebutuhan bahan pokok seluruh anggota keluarga, baik yang berpenghasilan maupun tidak.

$$ATP_{\text{umum}} = \frac{I_t \times P_p}{T_t} \dots\dots\dots$$

Dimana :

I_t = Total pendapatan keluarga perbulan (Rp/bulan)

P_p = Prosentase pengeluaran untuk membeli kebutuhan bahan pokok per bulan dari total pendapatan keluarga

T_t = Total kebutuhan bahan pokok keluarga per bulan.

Analisis pada penelitian ini dilakukan terhadap tarif resmi yang berlaku dengan menyertakan faktor-faktor ATP, WTP dan harga yang berlaku saat ini. Untuk melihat sejauh mana kondisi ini terjadi akibat adanya perbedaan hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut :

1. Harga yang berlaku saat ini lebih kecil dari ATP dan WTP

Apabila terjadi kondisi ini maka kemampuan masyarakat sangat baik, karena tarif yang diberlakukan ternyata lebih kecil dari daya beli masyarakat. Pada kondisi ini masyarakat mampu membeli jasa atau barang yang ditawarkan tanpa memikirkan untuk mencari alternatif lain.

2. Harga yang berlaku hampir sama dengan ATP dan WTP

Pada kondisi ini pemakai jasa berkemampuan hampir sama dengan tarif yang diberlakukan, tidak semua masyarakat mampu membeli jasa atau barang tersebut, ada kemungkinan sebagian masyarakat yang menggunakan alternatif lain.

3. Harga yang berlaku lebih besar dari ATP dan WTP

Apabila terjadi kondisi seperti ini maka kemampuan dari masyarakat sangat jelek, karena tarif yang diberlakukan ternyata lebih besar dari daya beli masyarakat, maka sebagian besar masyarakat tidak mampu membeli barang atau jasa yang ditawarkan.

Berikut merupakan penjabaran proses perhitungan ATP dan WTP pada masing-masing jenis bahan pokok :

1. Beras

$$I_t = \text{Rp. } 1.900.000$$

$$P_p = 12,12\%$$

Pengeluaran =

- Rata-rata harga pembelian beras/liter = Rp 7.678
- Rata-rata pengeluaran untuk membeli beras/bulan
= 7.678×30
= Rp 230.340 (asumsi 1 liter 1 hari)
- Persentase Pengeluaran untuk beras perbulan terhadap penghasilan perbulan
= $230.340 / 1.900.000 \times 100$
= 12,12%

$$T_t = 30 \text{ (30 hari dalam sebulan)}$$

$$\text{ATP} = \frac{1.900.000 \times 12,12\%}{30}$$

$$\text{ATP} = 7.676$$

2. Gula Pasir

$$I_t = \text{Rp. } 1.900.000$$

$$P_p = 2,01\%$$

Pengeluaran =

- Rata-rata harga pembelian gula pasirs/kg = Rp 9.571
- Rata-rata pengeluaran untuk membeli gula pasir/bulan
= 9.571×4
= Rp 38.284 (asumsi 1 kg 1 minggu)
- Persentase Pengeluaran untuk gula pasir perbulan terhadap penghasilan perbulan
= $38.284 / 1.900.000 \times 100$
= 2,01%

$$T_t = 30 \text{ (30 hari dalam sebulan)}$$

$$\text{ATP} = \frac{1.900.000 \times 2,01\%}{4} = 9.547$$

3. Minyak Goreng

$$I_t = \text{Rp. } 1.900.000$$

$$P_p = 2\%$$

Pengeluaran =

- Rata-rata harga pembelian minyak goreng/liter = Rp 9.500
- Rata-rata pengeluaran untuk membeli minyak goreng/bulan
 $= 9.500 \times 4$
 $= \text{Rp } 38.000$ (asumsi 1 liter 1 minggu)
- Persentase Pengeluaran untuk minyak goreng perbulan terhadap penghasilan perbulan
 $= 38.000 / 1.900.000 \times 100$
 $= 2\%$

$$T_t = 30 \text{ (30 hari dalam sebulan)}$$

$$\text{ATP} = \frac{1.900.000 \times 2\%}{4}$$

$$\text{ATP} = 9.500$$

4. Daging Sapi

$$I_t = \text{Rp. } 1.900.000$$

$$P_p = 4,3\%$$

Pengeluaran =

- Rata-rata harga pembelian daging sapi/kg = Rp 82.693
- Rata-rata pengeluaran untuk membeli daging sapi/bulan (asumsi 1 bulan 1 kg)
 $= 82.693$
- Persentase Pengeluaran untuk daging sapi perbulan terhadap penghasilan perbulan
 $= 82.693 / 1.900.000 \times 100$
 $= 4,3\%$

$$T_t = 30 \text{ (30 hari dalam sebulan)}$$

$$\text{ATP} = \frac{1.900.000 \times 4,3\%}{1}$$

$$\text{ATP} = 81.700$$

5. Tepung Terigu

$$I_t = \text{Rp. } 1.900.000$$

$$P_p = 1,21\%$$

Pengeluaran =

- Rata-rata harga pembelian tepung terigu/kg = Rp 5.786
- Rata-rata pengeluaran untuk membeli tepung terigu/bulan (asumsi 1 minggu 1 kg)
 $= 5.786 \times 4$
 $= 23.144$
- Persentase Pengeluaran untuk tepung terigu perbulan terhadap penghasilan perbulan
 $= 23.144 / 1.900.000 \times 100$
 $= 1,21\%$

$T_t = 30$ (30 hari dalam sebulan)

$$\text{ATP} = \frac{1.900.000 \times 1,21\%}{4}$$

$$\text{ATP} = 5.748$$

6. Daging Ayam

$$I_t = \text{Rp. } 1.900.000$$

$$P_p = 1,45\%$$

Pengeluaran =

- Rata-rata harga pembelian Daging Ayam/kg = Rp 27.714
- Rata-rata pengeluaran untuk membeli Daging Ayam/bulan (asumsi 1 bulan 1 kg)
 $= 27.714$
- Persentase Pengeluaran untuk Daging Ayam perbulan terhadap penghasilan perbulan
 $= 27.714 / 1.900.000 \times 100$
 $= 1,45\%$

$T_t = 30$ (30 hari dalam sebulan)

$$\text{ATP} = \frac{1.900.000 \times 1,45\%}{1}$$

$$\text{ATP} = 27.550$$

Tabel 5. 5 Harga Subsidi Maksimal Dalam Rangka Operasi Pasar Murah (OPM)

Bahan Pokok	It	Pp	Tt	ATP	WTP	Harga Jual	Subsidi	Pembulatan	persentase
Beras	1.900.000	12,12%	30	7.676	7.600	9.000	1.324	2.000	14,7%
Gula Pasir	1.900.000	2,01%	4	9.547	9.500	13.000	3.453	4.000	26,6%
Minyak Goreng	1.900.000	2%	4	9.500	9.500	11.500	2.000	2.000	17,4%
Daging Sapi	1.900.000	4,30%	1	81.700	82.693	110.000	28.300	29.000	25,7%
Tepung Terigu	1.900.000	1,21%	4	5.748	5.786	6.500	752	1.000	11,6%
Daging Ayam	1.900.000	1,45%	1	27.550	27.714	36.000	8.450	9.000	23,5%

Sumber : Hasil Analisis, 2019

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari. 2004. Efektifitas Kompensasi Subsidi dan Dampak Penghapusan Subsidi BBM Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*. 120- 121.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta; Gracia Indonesia.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta; LP3ES.
- Suparmoko. 1996. *Ekonomi Untuk Menejer*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada
- Utomo, Yuni Pribadi. 2005. Penurunan Model Estimasi Jangka Pendek ECM. makalah tidak diterbitkan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widoyono. 2005. *Mikro Ekonomi*. Univrsitas Muhamadyah Surakarta.
- Yusroni, Nanang. 2002. Analisis Dampak Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Sektor Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 3(2); 223-248.

LAMPIRAN 1. SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI DAN PEMBAGIAN TUGAS

No	Nama/NID N	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Aditionata ST, M.Si/ 0321118403	Universitas Esa Unggul	Perencanaan Wilayah dan Kota	10 Jam/Minggu	<ol style="list-style-type: none">1. Memimpin pelaksanaan penelitian2. Menyusun rencana kerja3. Melakukan pengumpulan data.4. Melakukan riset5. Melakukan analisa6. Menyusun laporan

LAMPIRAN 2. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGUSUL
KETUA TIM

A. IDENTITAS DIRI :

Nama	Aditianata, ST., M.Si
Jenis Kelamin	Laki-Laki / L
Jabatan Fungsional	Dosen Tetap Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Esa Unggul
NIK	214090547
NIDN	0321118403
Tempat/Tanggal Lahir	Jakarta/21 November 1984
Email	aditianata@esaunggul.ac.id
NoTelepon/HP	081284249937
Alamat Kantor	Jl. Arjuna Utara No. 9, KebonJeruk, Jakarta Barat 11510
Nomor Telepon/Faks	
Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = 10 orang; S-2 = - orang; S-3 = - orang
Mata Kuliah yang diampu	1. Perencanaan Kawasan Pesisir
	2. Isu-Isu Perencanaan Kontemporer
	3. Geografi Kota
	4. Studio Manajemen Perkotaan

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas INDONUSA Esa Unggul	Universitas Indonesia (UI)	
Bidang Ilmu	Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	Kajian Pengembangan Perkotaan	
Tahun Masuk-Lulus	2004 - 2010	2011 - 2014	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Identifikasi Proses dan Dampak Perubahan Fungsi Perumahan menjadi Komersil di Koridor Wolter Monginsidi dan Kawasan Pasar Santa, Kecamatan Kebayoran Baru	Mengurangi Ketimpangan Pembangunan di wilayah Kepulauan dan Daratan Menuju Pembangunan Permukiman Kepulauan Mikro yang Berkelanjutan (Studi Kasus : Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta)	
Nama Pembimbing/promotor	- Ir. Holiqurrahman Raus, IAP - Ir. Yuliarti	Prof. Dr. Ir. Abimanyu Takdir Alamsyah, MS	

C. PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
(bukan skripsi, tesis, maupun disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2014	Measuring development disparity within DKI Jakarta province: A comparative study on Jakarta coastal area and small islands	Klaster Riset Perkotaan UI	7.000.000
2	2015	Evaluation on coastal management on north coastal of Java : A comparative study on north coastal of Semarang and Serang	Klaster Riset Perkotaan UI	7.000.000
3	2016	Disaster Mitigation based network analysis and spatial analysis to support the sustainability of settlements in the island micro. Case Study: Thousand Islands, DKI Jakarta	Universitas Esa Unggul	7.000.000
4	2017	Evaluasi Kesesuaian Lokasi Kantor Posko Pemadam Kebakaran di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan	Universitas Esa Unggul	2.000.000
5	2018	Analisis Interkoneksi Pada Gugus Pulau Harapan untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata Bahari berbasis Ekowisata, Kepulauan Seribu	Dikti (PDP)	17.000.000

D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2013	Pendampingan masyarakat dalam Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kelurahan Pulau Tidung	PNPM Mandiri Perkotaan	50.000.000
2	2014	Pendampingan masyarakat dalam Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kelurahan Duri Kosambi	PNPM Mandiri Perkotaan	50.000.000
3	2015	Pendampingan masyarakat dalam Penyusunan Rencana Aksi Program Penanganan Banjir di Kelurahan Duri Kosambi	PNPM Mandiri Perkotaan	10.000.000

E. PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Dampak Pembangunan Kota pada Kesehatan dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Kesehatan Perkotaan	Jurnal Planesa	Volume 6/Nomor 2/November 2015

F. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH (ORAL PRESENTATION) DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	1 st Geoplanning International Conference on Geomatics and Planning	Disaster Mitigation based network analysis and spatial analysis to support the sustainability of settlements in the island micro. Case Study: Thousand Islands, DKI Jakarta	10-11 Agustus 2016 Kuta Paradiso, Bali

G. KARYA BUKU DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. PEROLEHAN HKI DALAM 10 TAHUN TERAKHIR

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA DALAM 10 TAHUN TERAKHIR

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah ditetapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

**J. PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR
(Dari Pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan **penelitian internal**

Jakarta, 02 Maret 2020

Ketua Tim Pengusul,



(Aditianata, ST., M.Si)

SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Aditianata, ST., M.Si.
NIDN :0321118403
Pangkat/Golongan : (3B) Penata Muda Tingkat I
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul :

Analisa Kebutuhan Data Kebutuhan Pokok Dan Penentuan Harga Subsidi Dalam Rangka Operasi Pasar Murah (OPM) Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Di Kabupaten Bogor

Yang diusulkan dalam skema **penelitian internal** untuk tahun anggaran 2020 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Ketua LPPM,

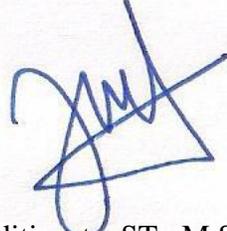


(Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc)

NIK/NIDN. 209100388

Jakarta, 02 Maret 2020

Yang Menyatakan,



(Aditianata, ST., M.Si)

NIK/NIDN. 214090547